

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Peres. Jakarta.

Agus Kasiyanto. 2018. *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*. Kencana. Jakarta.

Ahmad Shofin Nuzil. 2014. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Telaah Yuridis dan Normatif Terhadap Pidana)*. CV Garuda Mas Sejahtera. Surabaya.

Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Edisi Kedua*. Kencana. Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press. Makassar.

Ardhian Eko H. 2017. *Kompilasi Hukum Korupsi*. Relasi Inti Media. Yogyakarta.

Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Chairul Huda. 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- Deni Setyawati. 2008. *KPK Pemburu Koruptor: Kiprah Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Memberangus Korupsi*. Pustaka Timur. Yogyakarta.
- Didik Endro Purwoleksono. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Airlangga University Press. Surabaya.
- Elwi Danil. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Evi Hartanti. 2009. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- H. Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara. Sidoarjo.
- , 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Indriyanto Sena Adji. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Diadit Media. Jakarta.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana. Jakarta.
- Juni Sjfrien. 2012. *Say No To Korupsi Mengenal, Mencegah, & Memberantas Korupsi di Indonesia*. Visimedia. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Marwan Batubara.et.al. 2008. *Skandal BLBI: Ramai-Ramai Merampok Negara*. Haekal Media Center. Jakarta.

- PAF Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurispudensi*. Kencana. Jakarta.
- Rudy Cahya Kurniawan. 2021. *Pengaturan Kewenangan KPK dan POLRI dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Deepublish. Yogyakarta.
- S.R Sianturi. 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETAHAEM. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana I*. CV. ARMICO. Bandung.
- Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Antikorupsi. 2018. *Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi Edisi Revisi*. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Jakarta.
- Tolib Effendi. 2019. *Buku Ajar Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.
- Tri Astuti Handayani. 2018. *Hukum Acara Pidana Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*. Nusa Media. Bandung.
- Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Yudi Kristiana. 2006. *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

JURNAL

Edi Boni Mantolas, I Putu Eka Cakra, Joko Setiyono. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Analisis Perbandingan UU Nomor 30 Tahun 2002 dan UU Nomor 19 Tahun 2019)*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Universitas Diponegoro. Vol. 6 Nomor 9 September 2021.

SKRIPSI/TESIS

Anang Zaki Kurniawan. 2011. *Hak Korban Dalam Penentuan Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Perkara Kekerasan Rumah Tangga*. Tesis. Magister Hukum. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.

Andi Chaerunnisyah Abdullah. 2015. *Analisis Yuridis Terhadap Ketidakwenangan Penyidik KPK Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Irfan Saputra. 2016. *Kewenangan Penyidik Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

Uni Malihah. 2016. *Tinjauan Terhadap Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Perkara Korupsi (Studi Penerbitan SP3 Nomor: Print-369/0.4/FD.1/08/2015 Di Kejaksaan Tinggi DIY)*. Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana